

CASCADING PERUBAHAN RENSTRA DINAS PERTANIAN DAN TANAMAN PANGAN TAHUN 2019-2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Urusan	Visi	Misi	Isu Strategis Daerah	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Formula Indikator Tujuan Daerah	Masalah Pokok Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Formula Indikator Sasaran Daerah	Strategi Daerah	Arah Kebijakan Daerah	Isu Strategis PD	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Formula Tujuan PD	Masalah Pokok PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	
Pangan	Terejadinya Masyarakat Kabupaten Magelang Yang Sejahtera, Berdaya Saing dan Amanah (SEDAYA AMANAH)	Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Sejahtera dan Berakhlak Mulia	Belum optimalnya kualitas sumber daya manusia	Meningkatnya paritas daya beli masyarakat	Angka kemiskinan	persentase penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan (GK)	Belum Optimalnya Ketahanan Pangan Daerah	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Indeks Ketahanan Pangan	Angka dari Publikasi Indeks Ketahanan Pangan dari Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian	Meningkatkan ketahanan pangan	Meningkatkan pengelolaan sumber daya ekonomi yang mendukung kedaulatan dan kemandirian pangan	Belum optimalnya Ketahanan Pangan Daerah	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Indeks Ketahanan Pangan	Angka dari Publikasi Indeks Ketahanan Pangan dari Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian	Belum optimalnya ketersediaan, akses distribusi, pola konsumsi dan keamanan pangan	Mengoptimalkan ketersediaan, akses distribusi, pola konsumsi dan keamanan pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi
					Pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan (daya beli yang stabil)	kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya dalam bentuk barang maupun jasa.						Meningkatkan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat							Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan	

Inflasi

Inflasi diukur melalui perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari waktu ke waktu. Indeks Harga Konsumen (IHK) adalah indeks yang menghitung rata-rata perubahan harga dari suatu paket barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dalam kurun waktu tertentu. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) dari barang dan jasa.

											Menanggulangi kerawanan pangan Masyarakat								
											Meningkatkan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan masyarakat								
4, Pertanian	Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang Yang Sejahtera, Berdaya Saing dan Amanah (SEDAYA AMANAH)	Meningkatkan Daya Saing Daerah yang berbasis pada potensi lokal dengan tetap menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup	Belum optimalnya daya saing daerah	Meningkatnya daya saing daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persentase pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu	Belum Optimalnya Daya Saing Ekonomi Daerah	Meningkatnya daya saing ekonomi daerah	Nilai PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	Nilai PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan tahunan (Perhitungan BPS)	Mengembangkan produk pertanian yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan	Meningkatkan ketersediaan dan pengembangan sarana pertanian	Belum Optimalnya daya saing ekonomi daerah melalui peningkatan daya saing produk	Meningkatnya daya saing ekonomi daerah melalui peningkatan	Nilai PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	Nilai PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan tahunan (Perhitungan BPS)	Belum optimalnya produk pertanian yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan	Berkembangnya produk pertanian berdaya saing dan berwawasan lingkungan	Persentase kenaikan produksi pertanian/ perkebunan

PDRB per Kapita

Produk Domestik Regional Bruto  
(PDRB) dibagi dengan jumlah penduduk

Persentase kenaikan luas lahan pertanian unggulan

Meningkatkan  
ketersediaan dan  
pengerangan  
prasarana pertanian

Pengendalian dan  
penanggulangan  
bencana pertanian



Formula Sasaran PD	Masalah PD	Sasaran program	Strategi PD	Program	Indikator Program	Formula Indikator Program	Akar Masalah PD	Sasaran Kegiatan	Arah Kebijakan PD	Kegiatan	Kelompok Sasaran Kegiatan	Sub Kegiatan	Formula Indikator Kegiatan dan Sub Kegiatan	PD Penanggungjawab
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
<p>Jumlah seluruh skor PPH aktual dari masing-masing kelompok pangan</p> $SK1 = \left[ 2 - \frac{CVKR1}{CVKT1} \right] \times 100\%$ <p>Keterangan:                      KH : untuk Harga                      KP : untuk Pasokan                      CVKR1 : Koefisien keragaman Realisasi untuk Harga dan Pasokan komoditas ke-1                      CVKT1 : Koefisien keragaman Target untuk Harga dan Pasokan komoditas ke-1</p> <p>(konsumsi pangan riil masyarakat/standar konsumsi pangan nasional) * 100%</p>	<p>Belum optimalnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan</p>	<p>Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi yang mendukung kedaulatan dan kemandirian pangan</p>	<p>Meningkatkan pengelolaan sumber daya ekonomi yang mendukung kedaulatan dan kemandirian pangan</p>	<p>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN</p>	<p>Cakupan ketersediaan infrastruktur pendukung kemandirian pangan</p>	<p>(Jumlah ketersediaan infrastruktur pendukung kemandirian pangan : jumlah kebutuhan infrastruktur pendukung kemandirian pangan) x 100%</p>	<p>Belum optimalnya penyediaan infrastruktur pendukung kemandirian pangan</p>	<p>Tersedianya infrastruktur pendukung kemandirian pangan</p>	<p>Penyediaan infrastruktur pendukung kemandirian pangan</p>	<p>Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</p>	<p>Kelompok Tani, Gapoktan, KWT dan komunitas petani lainnya</p>	<p>Jumlah infrastruktur pendukung kemandirian pangan yang tersedia</p>	<p>Jumlah infrastruktur pendukung kemandirian pangan yang tersedia</p>	<p>Distan dan Pangan</p>
										<p>Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan</p>		<p>Jumlah lumbung pangan yang tersedia</p>	<p>Jumlah lumbung pangan yang tersedia</p>	
										<p>Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur</p>		<p>Jumlah lantai jemur yang tersedia</p>	<p>Jumlah lantai jemur yang tersedia</p>	
										<p>Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya</p>		<p>Jumlah infrastruktur pendukung kemandirian pangan yang tersedia</p>	<p>Jumlah infrastruktur pendukung kemandirian pangan yang tersedia</p>	
										<p>Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik</p>		<p>Jumlah koordinasi dan sinkronisasi yang terlaksana</p>	<p>Jumlah koordinasi dan sinkronisasi yang terlaksana</p>	
										<p>Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan</p>		<p>Jumlah dokumen rencana peta jalan kebutuhan infrastruktur pendukung</p>	<p>Jumlah dokumen yang tersusun</p>	
<p>Diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat belum optimal</p>	<p>Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat</p>	<p>Meningkatkan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat</p>	<p>PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</p>	<p>1. Ketersediaan informasi pasokan harga dan akses pangan di daerah</p>	<p>(ketersediaan informasi komoditas, lokasi dan waktu/ 3)*100%</p>	<p>Masih rendahnya informasi pasokan, harga dan akses pangan</p>	<p>Tersedianya informasi dan akses pangan</p>	<p>Ketersediaan informasi dan akses pangan</p>	<p>Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan</p>	<p>Kelompok Tani, Gapoktan, KWT dan komunitas petani lainnya</p>	<p>1. jumlah laporan Neraca Bahan Makanan (NBM) yang tersusun</p>	<p>Jumlah dokumen laporan yang tersusun</p>	<p>Pangan dan Pangan</p>	
											<p>Jumlah laporan Neraca Bahan Makanan (NBM) yang tersusun</p>	<p>Jumlah dokumen laporan yang tersusun</p>		



						2. Jumlah laporan analisis data informasi alur distribusi dan harga pangan strategis yang disusun	jumlah dokumen laporan yang tersusun	
					Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) yang terdampingi	jumlah Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) yang terdampingi	
					Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah kelembagaan usaha pangan masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang terdampingi	jumlah kelembagaan usaha pangan masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang terdampingi	
2. Penguatan Cadangan Pangan	(Jenis cadangan pangan kabupaten (ton)/100 ton)*100%	Masih rendahnya cadangan pangan daerah	Tersedianya cadangan pangan yang mencukupi	Tersedianya cadangan pangan yang mencukupi	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Kelompok Tani, Gapoktan, KWT dan komunitas petani lainnya	Jumlah pengelolaan cadangan pangan kabupaten	Jumlah pengelolaan cadangan pangan kabupaten
					Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota		jumlah pengadaan cadangan pangan kabupaten	jumlah pengadaan cadangan pangan kabupaten
					Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota		Jumlah cadangan pangan yang terpelihara	Jumlah cadangan pangan yang terpelihara
3. Ketersediaan energi per kapita	ketersediaan kalori (kkal /kapita/hari) = (ketersediaan energi / kapita / hari x kandungan kalori x BDD) /100	Belum optimalnya pencapaian target konsumsi pangan masyarakat	Tercapainya target konsumsi pangan per kapita per tahun sesuai angka kecukupan gizi	Tercapainya target konsumsi pangan per kapita per tahun sesuai angka kecukupan gizi	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Kelompok Tani, Gapoktan, KWT dan komunitas petani lainnya	Jumlah dokumen Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi yang tersusun	Jumlah dokumen yang tersusun
					Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		1. Jumlah Kelompok Pemanfaatan Pekarangan yang terbina	1. Jumlah Kelompok Pemanfaatan Pekarangan yang terbina
							2. jumlah peserta sosialisasi penyusunan menu B2SA	2. jumlah peserta sosialisasi penyusunan menu B2SA
							3. jumlah lomba festival pangan yang terselenggara	3. jumlah lomba festival pangan yang terselenggara
							4. jumlah peserta pengembangan olahan pangan lokal yang terbina	4. jumlah peserta pengembangan olahan pangan lokal yang terbina
4. Ketersediaan protein per kapita	ketersediaan protein (kkal /kapita/hari) = (ketersediaan pangan/kapita/hari x kandungan protein x BDD) /100				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun		jumlah laporan analisis skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	jumlah dokumen laporan yang tersusun



Kerawanan pangan masih terjadi di beberapa lokasi	Tertinggalnya kerawanan pangan Masyarakat	Menangguangi kerawanan pangan Masyarakat	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	persentase penanganan daerah rentan rawan pangan	(Jumlah desa rawan pangan yang tertangani/ Jumlah seluruh desa rawan pangan)*100%	Belum optimalnya penanganan kerawanan pangan	Terusunnya peta kerentanan pangan dan penanganan kerawanan pangan kewenangan kabupaten	Penyusunan peta kerentanan pangan dan penanganan kerawanan pangan kewenangan kabupaten	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Perangkat Daerah terkait	jumlah dokumen peta kerentanan dan ketahanan pangan yang disusun	jumlah dokumen peta kerentanan dan ketahanan pangan yang disusun
Lemahnya pengawasan keamanan pangan	Meningkatnya pengawasan dan pembinaan keamanan pangan masyarakat	Meningkatkan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan masyarakat	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	(Jumlah komoditas pangan yang aman/ jumlah sample komoditas pangan)*100%	Belum optimalnya pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	Meningkatnya pengawasan, pembinaan mutu dan keamanan pangan	Peningkatan Pengawasan, pembinaan mutu dan keamanan pangan	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Kelompok Tani, Gapoktan, KWT dan komunitas petani lainnya	Jumlah pengawasan keamanan pangan segar yang terlaksana	jumlah pengawasan keamanan pangan segar yang terlaksana
$\frac{2}{(prod\ komoditas\ 1\ tahun\ n - prod\ komoditas\ 1\ tahun\ n - 1)} \times 100\% + \dots + \frac{1}{(prod\ komoditas\ 10\ tahun\ n - prod\ komoditas\ 10\ tahun\ n - 1)} \times 100\%$ (padi, jagung, cabai, bawang putih, kopi, cengkeh, kelapa)	belum terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana Pertanian yang memadai	Meningkatnya ketersediaan dan pengembangan sarana pertanian	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Cakupan penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	(Jumlah kelompok tani yang terfasilitas sarana pertanian dibagi jumlah kelompok tani Kabupaten Magelang) x 100%	Belum optimalnya pengawasan penggunaan sarana pertanian	Meningkatnya pengawasan penggunaan sarana pertanian	Meningkatkan pengawasan penggunaan sarana pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Kelompok Tani, Gapoktan, KWT dan komunitas petani lainnya	Jumlah pembinaan/ pengawasan kepada kelompok tani penerima sarana pendukung pertanian	Jumlah pembinaan/ pengawasan kepada kelompok tani penerima sarana pendukung pertanian
									Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi		1. jumlah bibit cengkeh yang tersalurkan ke kelompok tani 2. jumlah bibit kopi yang tersalurkan ke kelompok	1. jumlah bibit cengkeh yang tersalurkan ke kelompok tani 2. jumlah bibit kopi yang tersalurkan ke kelompok tani



										Manfaat SDG Hewani/Tanaman		1. jumlah sarana produksi tanaman hortikultura yang disalurkan ke kelompok tani 2. jumlah sarana pasca panen tanaman hortikultura yang tersalurkan ke kelompok 3. jumlah penumbuhan, pengembangan, dan pendampingan sentra 4. Jumlah agregat dan tanaman hias lainnya yang dibudidayakan	1. Jumlah sarana produksi tanaman hortikultura yang disalurkan ke kelompok tani 2. jumlah sarana pasca panen tanaman hortikultura yang tersalurkan ke kelompok 3. jumlah penumbuhan, pengembangan, dan pendampingan sentra buah 4. Jumlah agregat dan tanaman hias lainnya yang dibudidayakan
		Meningkatnya ketersediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Meningkatkan ketersediaan dan pengembangan prasarana pertanian	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Cakupan penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	(Jumlah kelompok tani yang terfasilitas prasarana pertanian dibagi jumlah kelompok tani Kabupaten Magelang) x 100%	Belum optimalnya pengembangan prasarana pertanian	Berkembangnya prasarana pertanian	Pengembangan prasarana pertanian	Pengembangan Prasarana Pertanian	Kelompok Tani, Gapoktan, KWT dan komunitas petani lainnya	jumlah dokumen pengembangan prasarana pertanian	jumlah dokumen pengembangan prasarana pertanian
										Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B		jumlah dokumen regulasi LP2B /KP2B/ LCP2B yang tersusun	jumlah dokumen regulasi LP2B /KP2B/ LCP2B yang tersusun
										Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B		jumlah dokumen peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B yang tersusun	jumlah dokumen regulasi LP2B /KP2B/ LCP2B yang tersusun
										Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya		1. jumlah pengelolaan hibah / bansos yang terfasilitasi 2. jumlah luasan kawasan agribisnis padi organik yang dikelola (upland)	jumlah dokumen peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B yang tersusun 1. jumlah pengelolaan hibah / bansos yang terfasilitasi
							Belum optimalnya pembangunan prasarana pertanian	Terbangunnya prasarana pertanian	Pembangunan prasarana pertanian	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas		jumlah dokumen masterplan yang tersusun	2. jumlah luasan kawasan agribisnis padi organik yang dikelola (upland)
										Pembangunan Prasarana Pertanian	Prasarana Pertanian di wilayah	jumlah prasarana pertanian yang dibangun	jumlah dokumen masterplan yang tersusun
										Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani		Jumlah jaringan irigasi (tersier, perpipaan dan sumur tanah dangkal)	jumlah prasarana pertanian yang dibangun
										Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian		jumlah pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan embung	Jumlah jaringan irigasi (tersier, perpipaan dan sumur tanah dangkal) yang dibangun,
										Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani		jumlah pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha	jumlah pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan embung pertanian
										Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit		jumlah pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan dam parit	jumlah pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani
										Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Long Storage		jumlah pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan long	jumlah pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan dam parit
										Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana		jumlah pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan Balai	jumlah pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan long storage
										Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya		jumlah pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana	jumlah pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana
	Adanya ancaman bencana pertanian dalam peningkatan produksi pertanian	Terkendalnya dan tertanggulangnya bencana pertanian	Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Cakupan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	luas lahan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian / luas lahan pertanian x 100%	Belum optimalnya penanggulangan bencana pertanian	Terkendali dan tertanggulangnya bencana pertanian	Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Kelompok Tani, Gapoktan, KWT dan komunitas petani lainnya	Cakupan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	jumlah pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana pertanian lainnya
										Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan		jumlah pengadaan obat-obatan pengendali hama dan penyakit tanaman	Cakupan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian
										Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan		jumlah sekolah lapang iklim yang terlaksana	jumlah pengadaan obat-obatan pengendali hama dan penyakit tanaman
										Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan		1. jumlah bimbingan Unit Pengelola Jasa Asuransi (UPJA) yang terlaksana	jumlah sekolah lapang iklim yang terlaksana



